

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan studi awal melalui wawancara dengan Bapak Acep Rusnandar selaku bagian sistem informasi Kementerian Agama Kota Bandung [27 Oktober 2025] data pendaftaran jemaah untuk tahun 2025 menunjukkan angka yang signifikan, yakni 225 jemaah telah melakukan setoran ke bank. Dari jumlah tersebut, sebanyak 197 jemaah telah terkonfirmasi secara resmi di Kementerian Agama Kota Bandung. Ditemukan beberapa gejala masalah yang menjadi hambatan dalam proses perekaman biometrik. Kendala utama yang sering menghambat proses adalah faktor teknis, yakni ketidakstabilan jaringan (internet) dan *error* pada aplikasi Saudi Visa Bio. Selain itu, tantangan juga muncul dari kondisi jemaah, banyak jemaah lansia yang memiliki sidik jari tipis sehingga menyulitkan proses pemindaian dan validasi data biometrik.

Selain kendala teknis, ditemukan pula hambatan pada aspek alur birokrasi, khususnya bagi jemaah yang hanya memiliki satu suku kata nama di paspor. Jemaah tersebut diharuskan melakukan penambahan nama di kantor imigrasi terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan proses visa bio, yang menambah kompleksitas alur pelayanan. Keunikan fenomena dalam penelitian ini menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara tujuan ideal kebijakan (efisien dan cepat) dengan realitas di lapangan yang masih terkendala oleh faktor teknologi dan koordinasi antar-lembaga (Imigrasi). Di sisi lain, studi awal juga menemukan bahwa Kementerian Agama Kota Bandung telah

memiliki mekanisme yang berjalan baik, seperti penjadwalan yang teratur dan jumlah petugas yang memadai sehingga antrean jemaah dapat terkendali dengan baik.

Transformasi kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, kini pemerintah resmi mengalihkan wewenang penyelenggaraan haji dan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan UU NO. 14 Tahun 2025 dan Perpres No. 92 Tahun 2025. Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki mandat untuk menyelenggarakan seluruh tahapan ibadah haji secara aman, nyaman, dan efisien. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur restrukturisasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, termasuk legilasi umrah mandiri, penguatan hak PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) atas kuota tambahan, dan pengalihan wewenang ke Kementerian Agama, bertujuan meningkatkan pelayanan serta efisiensi jemaah (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, 2025).

Dalam era digitalisasi pelayanan publik, Kementerian Agama terus beradaptasi dengan inovasi teknologi. Tantangan sekaligus peluang baru hadir melalui kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang mewajibkan perekaman

data biometrik jemaah haji dan umrah sebelum keberangkatan. Kebijakan yang dikenal sebagai Saudi Visa Bio ini mengharuskan jemaah melakukan perekaman data wajah dan sidik jari secara mandiri melalui aplikasi seluler resmi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses imigrasi dan aspek keamanan di titik kedatangan jemaah. Bagi Indonesia, kebijakan ini menuntut kesiapan implementasi yang matang dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara, untuk memastikan seluruh jemaah haji reguler dapat mengakses dan menyelesaikan proses biometrik ini dengan lancar.

Ibadah haji memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam karena salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah ini bukan hanya kegiatan ritual, melainkan juga bentuk dari ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt. Haji ibadah yang mengandung nilai spiritual yang sangat mendalam, setiap jemaah menanggalkan simbol-simbol keduniawian dan menyatukan diri dalam semangat tauhid serta kesetaraan di hadapan Tuhan. Di sisi lain, haji memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan karena mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk menegaskan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas umat secara global (Kementerian Agama RI, 2023). Melalui penyelenggaraan haji, terbentuk pula jaringan sosial, ekonomi, dan budaya antarnegara Muslim yang memperkuat citra Islam sebagai agama universal dan *rahmatan lil 'alamin*.

Selain aspek spiritual dan sosial, ibadah haji juga menuntut tata kelola karena melibatkan jutaan jemaah dari seluruh dunia. Persiapan perjalanan, transportasi, akomodasi, kesehatan, serta keselamatan jemaah harus dikelola secara profesional agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Di Indonesia, penyelenggaraan haji menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Secara akademik, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat teori George C. Edward III masih efektif dalam menjelaskan proses digitalisasi layanan haji saat ini. Dengan menggunakan empat indikator yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Petugas (Disposisi), dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini akan mengungkap aturan dari Arab Saudi dijalankan di tingkat daerah. Mengingat Indonesia pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio bagi Jemaah Haji Reguler di Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini ingin mengetahui implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio bagi Jemaah Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025. Agar pada fokus penelitian ini lebih terarah untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan Saudi Visa Bio yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung kepada

Jemaah Haji reguler?

2. Bagaimana ketersediaan dan kesiapan sumber daya di Kementerian Agama Kota Bandung untuk mendukung implementasi Saudi Visa Bio?
3. Bagaimana disposisi aparatur pelaksana di Kementerian Agama Kota Bandung dalam memberikan pelayanan Saudi Visa Bio kepada Jemaah haji reguler?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan layanan Saudi Visa Bio di Kementerian Agama Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan Saudi Visa Bio yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung kepada Jemaah Haji reguler.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dan kesiapan sumber daya di Kementerian Agama Kota Bandung untuk mendukung implementasi Saudi Visa Bio.
3. Untuk mengetahui disposisi aparatur pelaksana di Kementerian Agama Kota Bandung dalam memberikan pelayanan Saudi Visa Bio kepada Jemaah haji reguler.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam pelaksanaan layanan Saudi Visa Bio di Kementerian Agama Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu manajemen haji dan umrah, secara khusus pada pengembangan kajian media untuk pelayanan haji serta dapat memperkaya literatur dan teori tentang “Implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio bagi Jemaah Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025”. Penulis juga berharap dengan penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi terkait topik yang dibahas.

2. Secara Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu manajemen haji dan umrah. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kementerian Agama Kota Bandung sebagai bahan untuk penilaian atau evaluasi terhadap media pelayanan haji.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

a. Implementasi

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan pada fase perumusan, melainkan pada kebijakan tersebut diwujudkan secara konkret di lapangan. Sebagai tahapan krusial, implementasi menuntut penerjemahan undang-undang menjadi aturan operasional dan regulasi taktis melalui pembentukan struktur organisasi penunjang, seperti departemen, lembaga, maupun biro penegak (Nugroho, 2017). Proses ini tidak sekadar bermakna menjalankan

instruksi, tetapi juga mencakup penyediaan sarana strategis yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan berfungsi sebagai instrumen dinamis yang mengubah keputusan formal baik berupa undang-undang, keputusan pengadilan, maupun perintah eksekutif menjadi aksi birokrasi yang sistematis (Abdal, 2025).

b. Aplikasi Saudi Visa Bio

1) Konsep Aplikasi Saudi Visa Bio

Di era digitalisasi pelayanan publik, penerapan aplikasi komputer tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan instrumen krusial untuk mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi sistem administrasi pemerintahan (Sutabri, 2012). Urgensi transformasi digital ini diadopsi secara utuh oleh Pemerintah Arab Saudi selaku pusat pelaksanaan ibadah haji dan umrah dunia, khususnya dalam mereformasi sistem keimigrasian. Sebagai otoritas tunggal yang berwenang menerbitkan visa atau izin masuk resmi bagi warga negara asing (Siswosoediro, 2008), Pemerintah Arab Saudi kini mengintegrasikan teknologi biometrik ke dalam proses birokrasi keimigrasiannya. Melalui pemanfaatan data biologis individu yang akurat seperti pemindaian sidik jari, wajah, dan iris mata (Authme, 2024). Kebijakan visa biometrik ini diwajibkan untuk memperketat sistem autentikasi sekaligus mempermudah mobilisasi jutaan jemaah dari berbagai dunia.

2) Perkembangan Saudi Visa Bio

Arab Saudi menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan fasilitas pengajuan penerbitan visa secara online dengan sistem biometrik. Calon pengunjung atau jemaah dapat melakukan pengajuan penerbitan berbagai jenis visa melalui aplikasi “Saudi Visa Bio” yang tersedia di *playstore* maupun *app store*. Prosedur penerbitan visa secara elektronik ini akan diselesaikan berdasarkan otentikasi biometrik seperti sidik jari dan wajah sebelum kedatangan Jemaah (Himpuh, 2022).

Perkembangan aplikasi Saudi Visa Bio mencerminkan transformasi digital dalam sistem visa kerajaan Arab Saudi yang mengintegrasikan teknologi biometrik ke dalam proses pengajuan visa. Aplikasi ini memungkinkan pemohon visa untuk menyerahkan data biometrik seperti sidik jari dan citra wajah secara daring melalui ponsel pintar, sehingga mengurangi kebutuhan antrean di pusat layanan visa. Dengan demikian, aplikasi tersebut tidak hanya mempercepat alur pendaftaran visa tetapi juga meningkatkan keamanan verifikasi identitas melalui teknologi biometrik.

3) Jemaah Haji Reguler

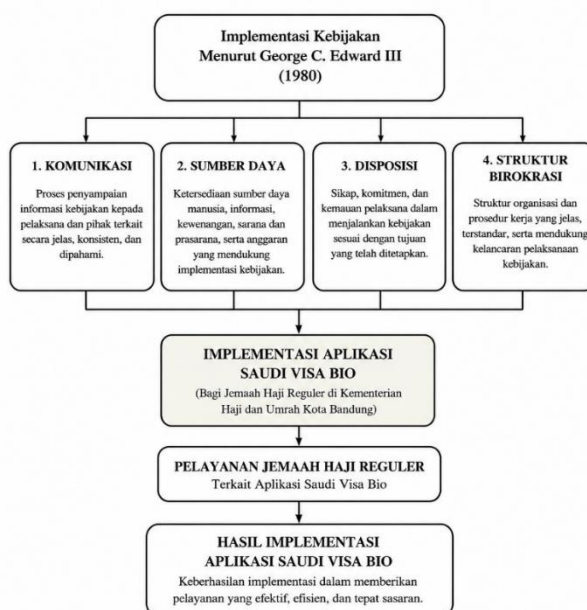
Dalam tradisi Islam, istilah “jemaah” secara filosofis merujuk pada ikatan kolektif masyarakat yang bergerak bersama dalam pelaksanaan ibadah. Manifestasi terbesar dari gerakan kolektif ini mewujudkan dalam ibadah haji, salah satu rukun Islam kelima

yang dilaksanakan di Tanah Suci Mekah berdasarkan tata cara syariat yang mencakup ihram, wukuf, sa'i, tahalul, dan tertib (Endang dkk., 2022). Di Indonesia, mobilisasi jemaah ini diatur secara formal melalui skema Haji Reguler, yaitu program penyelenggaraan ibadah haji standar yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui kementerian terkait, bukan oleh pihak swasta. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, pengelolaan operasional, pembiayaan, hingga pelayanan jemaah haji reguler berada di bawah otoritas menteri untuk memastikan pelayanan yang bersifat umum, inklusif, dan dapat diakses sepanjang tahun oleh Masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Implementasi sebagai tahap penting yang menjembatani antara perumusan kebijakan (oleh Pemerintah Arab Saudi dan diturunkan oleh Pemerintah Indonesia). Objek dari kebijakan yang diimplementasikan berupa Saudi Visa Bio. Kementerian Agama (Kantor Kementerian Agama Kota Bandung) sebagai aktor (implementor). Adapun sasaran dari penerapan kebijakan ini adalah Jemaah Haji Reguler.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur proses di mana Kementerian Agama (sebagai implementor) melaksanakan proses implementasi kebijakan Saudi Visa Bio yang ditujukan kepada Jemaah Haji Reguler (sebagai target kebijakan).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bandung, yang merupakan lembaga pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 498, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40212. Instansi ini dipilih

sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam penerapan dan pengoperasian aplikasi Saudi Visa Bio sebagai inovasi pelayanan haji berbasis teknologi biometrik.

2. Paradigma dan Pendekatan

Melalui paradigma konstruktivisme, penelitian ini menempatkan realitas kehidupan sosial bukan sebagai sesuatu yang alami dan kaku, melainkan sebagai sebuah konstruksi yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh temuan dan pemahaman yang dihasilkan dalam studi ini lahir langsung dari proses interaksi aktif antara peneliti dengan para informan di lapangan (Juniver, 2022). Berdasarkan dengan sifat dan karakter permasalahan data yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui fenomena mengenai implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio bagi Jemaah Haji Reguler.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata dan data yang akurat tentang proses implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio bagi Jemaah Haji Reguler di Kementerian Agama Kota Bandung.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk membedah secara utuh dan mendalam realitas sosial serta berbagai fenomena di masyarakat (Sukmawati dkk., 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses implementasi aplikasi Saudi Visa Bio oleh Kementerian Agama Kota Bandung, sekaligus mengurai faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang dihimpun dalam studi ini diwujudkan dalam bentuk narasi, rangkaian kata, serta visualisasi bukan dalam bentuk angka guna menangkap karakteristik dan model fenomena di lapangan secara rinci.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, narasi, dan penjelasan yang menggambarkan fenomena sosial secara mendalam.

b. Sumber Data

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, seluruh informasi dalam penelitian kualitatif ini dihimpun melalui dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam studi ini digali langsung dari aktor-aktor yang terlibat dalam eksekusi aplikasi Saudi Visa Bio. Informan kunci meliputi Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Petugas Operator Sistem Aplikasi, Sekretaris Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Jemaah Haji

Reguler yang telah melewati proses verifikasi biometrik. Seluruh data primer ini diperoleh secara aktif di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Untuk memperkuat dan memperkaya konteks analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai rujukan tidak langsung yang melengkapi temuan di lapangan (Sugiyono, 2016). Kebutuhan data sekunder ini dipenuhi melalui penelusuran berbagai dokumen resmi dan literatur penunjang yang relevan. Dokumen tersebut mencakup laporan berkala pelaksanaan ibadah haji, pedoman teknis operasional aplikasi Saudi Visa Bio, buku ilmiah, jurnal akademis, serta arsip resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

5. Penentuan Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari petugas Kementerian Agama Kota Bandung yang terlibat langsung dalam pelaksanaan aplikasi Saudi Visa Bio yaitu: Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Operator aplikasi Saudi Visa Bio, Sekretaris Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta jemaah haji reguler yang menjadi pengguna layanan tersebut.

b. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, terdapat unit yang diperlukan untuk digunakan selama melakukan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Petugas Operator Sistem Aplikasi Saudi Visa Bio di Kementerian Agama, peneliti ingin menganalisis proses perekaman biometrik untuk pembuatan Saudi Visa Bio bagi calon jemaah haji reguler yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2025.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai implementasi aplikasi Saudi Visa Bio.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas petugas Kementerian Agama saat melaksanakan proses perekaman biometrik, pelayanan jemaah haji, serta penggunaan sistem digital Saudi Visa Bio. Peneliti akan mengamati alur pelayanan jemaah haji reguler mulai dari pendaftaran hingga proses perekaman biometrik, kinerja perangkat (*smartphone/scanner*) dan kestabilan aplikasi Saudi Visa Bio saat digunakan, serta interaksi petugas dalam membimbing jemaah (khususnya lansia) yang mengalami kesulitan saat pemindaian wajah atau sidik jari. Observasi akan dilakukan

secara intensif selama periode pelunasan dan pemberkasan dokumen haji tahun 2025. Peneliti merencanakan kunjungan 1 (satu) kali dalam seminggu selama satu bulan penuh pada jam pelayanan aktif (08.00–15.00 WIB) untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur agar tetap fokus pada topik penelitian, namun memberi kebebasan bagi informan untuk menjelaskan secara mendalam pengalaman mereka dalam penerapan aplikasi Saudi Visa Bio. Wawancara akan dilakukan kepada informan kunci, yaitu: Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Petugas operator aplikasi Saudi Visa Bio, Sekretaris Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) dan perwakilan Jemaah haji reguler.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam studi ini juga mengoptimalkan teknik dokumentasi untuk menelusuri berbagai dokumen tertulis maupun visual sebagai bukti administratif dan sumber informasi penunjang (Bungin, 2017, hlm. 135). Melalui pendekatan tersebut, peneliti mengkaji secara mendalam laporan berkala kegiatan pelayanan haji, panduan teknis operasional aplikasi Saudi Visa Bio, serta dokumen administrasi relevan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kota Bandung. Langkah ini diambil untuk memperkuat validitas data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan di lapangan, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi data (Sugiyono, 2015). Pengujian ini dioperasikan dengan cara membandingkan dan mengonfronsikan informasi dari berbagai sumber serta teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam praktiknya, peneliti menyilangkan data hasil wawancara mendalam dari para informan, catatan hasil observasi lapangan mengenai implementasi aplikasi Saudi Visa Bio, serta dokumen administratif penunjang seperti foto kegiatan. Langkah konfirmasi silang ini dilakukan untuk mengeliminasi bias sekaligus menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif.

8. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang berhasil dihimpun mengenai implementasi aplikasi Saudi Visa Bio diolah secara interaktif dan berkesinambungan melalui model analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 1994). Proses interpretasi makna ini dijalankan melalui empat tahapan utama yang saling terintegrasi, yakni:

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi, seluruh data mentah yang bersumber dari catatan lapangan dipilah, disederhanakan, dan ditransformasikan secara ketat agar relevan dengan fokus studi. Proses seleksi data ini dioperasikan dengan mengelompokkan informasi ke dalam empat variabel utama dari teori implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sebaliknya, informasi yang tidak berkorelasi dengan dinamika maupun kendala operasional aplikasi Saudi Visa Bio dieliminasi secara sistematis. Langkah penyaringan ini bertujuan untuk menajamkan fokus analisis, mengurai kompleksitas data di lapangan, serta mempermudah peneliti dalam memetakan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Data mengenai alur pelayanan, kendala jaringan, dan respons jemaah akan disajikan secara sistematis untuk menggambarkan proses implementasi Aplikasi Saudi Visa Bio berjalan di Kementerian Agama Kota Bandung. Penyajian data membantu peneliti melihat pola, hubungan, serta dinamika antar komponen yang berkaitan dengan implementasi aplikasi Saudi Visa Bio.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bersifat sementara, kemudian diverifikasi berdasarkan temuan-temuan baru selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi Saudi Visa Bio serta faktor pendukung dan penghambatnya di Kementerian Agama Kota Bandung. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka dan dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih valid (Sugiyono, 2018, hlm. 246).